

(1)(2)(3) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: nikmayutrisna31@gmail.com

This study aims to analyze accountability and transparency in financial governance practices based on the Tri Hita Karana concept at Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar. The background of this research is driven by the importance of implementing good governance principles in managing funds of religious organizations, which are sourced from donations (punia), voluntary contributions, and other offerings. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants consist of the traditional village head (Bendesa Adat), temple treasurer, priest (Pemangku), and temple administrators (Pengempon). Data analysis applies the Miles and Huberman model, and data validity is ensured through method triangulation. The results indicate that accountability practices have been implemented quite well, as reflected in regular financial recording, the use of transaction evidence, and the preparation of financial reports after activities. However, the recording system is still simple and not yet standardized. Meanwhile, transparency has not been optimal, as financial information is only shared in internal meetings and not publicly accessible to the wider community. From the Tri Hita Karana perspective, financial management reflects harmony in parahyangan, pawongan, and palemahan. However, improving transparency is necessary to strengthen public trust and achieve better financial governance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Tri Hita Karana, Financial Governance, Temple*

Setiap organisasi memerlukan dana untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatannya. Dana umumnya diartikan sebagai kas yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Sumber internal berasal dari aktivitas operasional, sedangkan sumber eksternal diperoleh dari pihak luar seperti donatur. Dalam pengelolaannya, dana menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Hal ini menjadi semakin penting mengingat masih maraknya kasus penyelewengan dana, baik di sektor bisnis maupun organisasi nirlaba, termasuk organisasi keagamaan.

Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, yang harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menjadi sarana utama dalam mewujudkan akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus diterapkan pada organisasi keagamaan seperti pura. Pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai organisasi nirlaba yang mengelola dana dari masyarakat, seperti dana punia, sumbangan, dan sesari. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada umat dan donatur, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Data keuangan menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kas yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan lonjakan besar pada tahun 2023 akibat adanya bantuan pemerintah untuk renovasi dan pelaksanaan Karya Agung. Namun demikian, meskipun laporan keuangan telah disusun secara berkala, tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip transparansi yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam praktik tata kelola keuangan berlandaskan Tri Hita Karana di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip tersebut serta memberikan manfaat secara teoritis sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi pengelola pura dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai Tri Hita Karana.

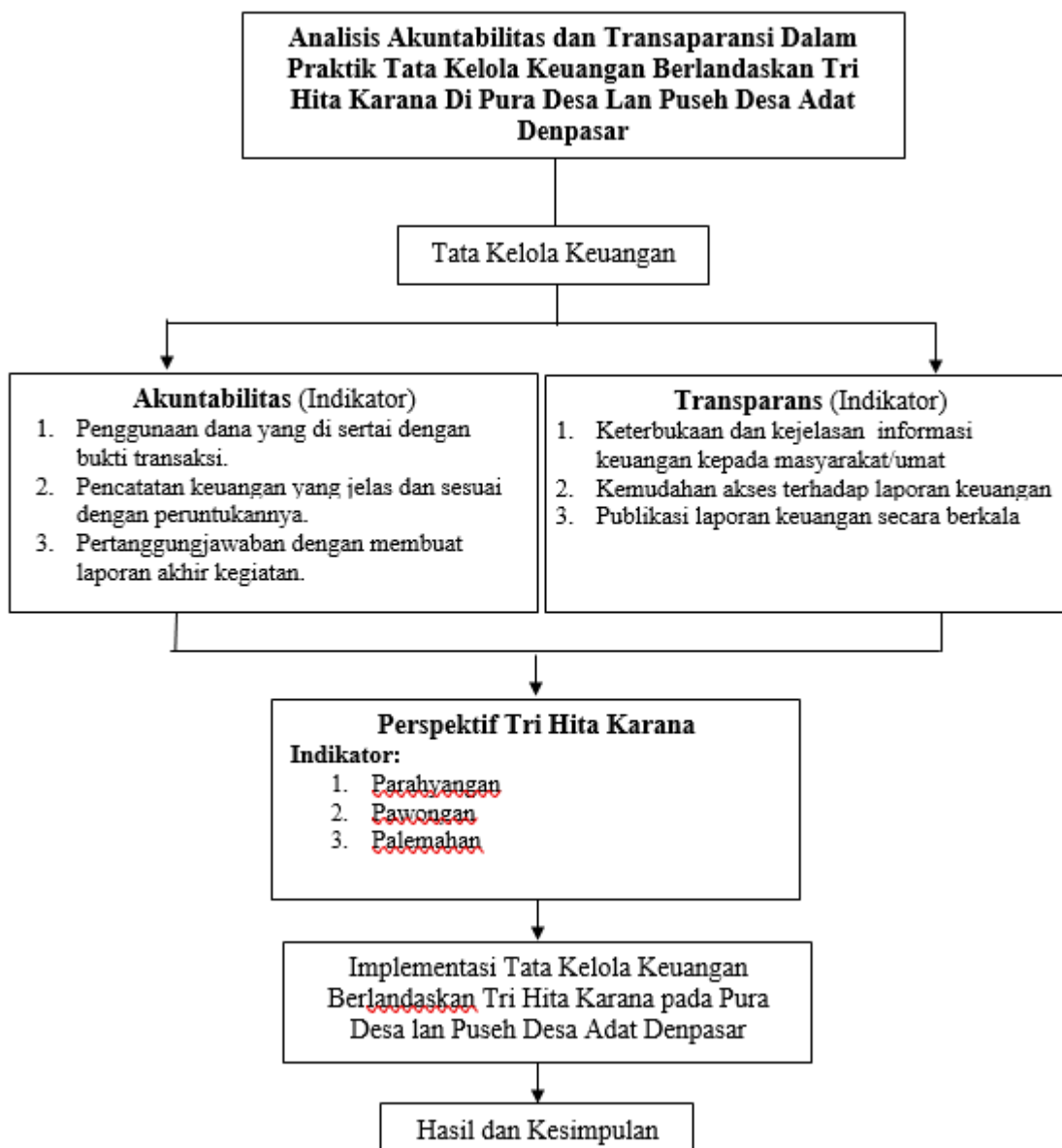
Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, pemerintah, dan entitas sejenis untuk mengelola serta melacak sumber daya keuangan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dalam sistem ini, setiap dana dipisahkan sesuai dengan peruntukannya sehingga memudahkan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Berbeda dengan akuntansi komersial yang berfokus pada laba, akuntansi dana lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Copley & Engstrom, 2019).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, maupun donor. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup pelaporan kinerja dan dampak yang dihasilkan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sawir, 2022).

Tri Hita Karana merupakan konsep filosofis dalam budaya Bali yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Konsep ini menjadi landasan etika dalam kehidupan masyarakat Bali dan dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi agar tercipta keharmonisan secara menyeluruh (Purnomo, 2018).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kondisi aktual serta hubungan antar variabel yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia di Pura Desa Lan Puseh Desa Adat Denpasar berdasarkan perspektif Tri Hita Karana. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait seperti bendesa, pemangku, pengurus, dan pengempon pura, serta

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki peran dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan pura, seperti bendesa sebagai pengambil kebijakan, pemangku dan pengurus pura sebagai pelaksana kegiatan, pengempon sebagai representasi masyarakat, serta masyarakat sebagai pihak yang memberikan kontribusi dana. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata terkait praktik pengelolaan dana, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis berupa catatan pemasukan dan pengeluaran dana punia. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar menunjukkan bahwa penggunaan dana telah disertai dengan bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran umumnya dicatat dan didukung dengan bukti yang ada, sehingga mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas. Namun demikian, dalam beberapa transaksi yang bersifat tradisional masih terdapat keterbatasan karena tidak selalu disertai bukti formal, sehingga akuntabilitas yang diterapkan belum sepenuhnya optimal.

196 | Hita Akuntansi dan Keuangan

pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan laporan setelah kegiatan berlangsung, terutama pada kegiatan besar, namun laporan tersebut masih bersifat internal dan belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar masih tergolong terbatas. Informasi terkait keuangan umumnya disampaikan dalam forum tertentu seperti rapat desa adat atau pertemuan perwakilan banjar, sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah ada, namun belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip transparansi yang seharusnya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kemudahan dalam mengakses laporan keuangan secara langsung. Meskipun laporan keuangan telah dibuat secara berkala, namun belum dipublikasikan melalui media yang dapat diakses secara luas seperti papan pengumuman atau media digital. Kondisi ini menyebabkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masih belum optimal karena informasi belum disampaikan secara terbuka dan merata kepada seluruh masyarakat.

Analisis Berdasarkan Perspektif Tri Hita Karana

Berdasarkan perspektif Tri Hita Karana, pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar telah mencerminkan keseimbangan pada aspek parahyangan, pawongan, dan palemahan. Pada aspek parahyangan, penggunaan dana difokuskan pada kegiatan keagamaan sebagai bentuk hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah sesuai dengan nilai spiritual yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Bali.

Pada aspek pawongan, partisipasi masyarakat dalam memberikan dana punia dan keterlibatan dalam kegiatan pura menunjukkan adanya hubungan sosial yang baik. Namun, keterbatasan transparansi dalam penyampaian informasi keuangan menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat. Sementara itu, pada aspek palemahan, penggunaan dana untuk pemeliharaan dan renovasi pura mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga secara keseluruhan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, meskipun masih perlu dioptimalkan terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pura

Indikator penelitian, akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Pada indikator penggunaan dana dengan bukti transaksi, meskipun pengelola pura telah berupaya mencatat setiap pengeluaran, masih terdapat keterbatasan, terutama ketika transaksi dilakukan secara tradisional tanpa bukti formal. Pada indikator pencatatan keuangan, meskipun semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas, sistem pencatatan masih sederhana dan belum berbasis standar akuntansi formal. Pada indikator pertanggungjawaban melalui laporan keuangan, laporan biasanya disusun setelah kegiatan besar, namun belum dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat internal dan administratif, sehingga perlu peningkatan agar memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Transparansi pengelolaan keuangan di Pura Desa Lan Puseh masih tergolong rendah berdasarkan indikator keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan publikasi laporan. Keterbukaan informasi masih terbatas pada forum tertentu, seperti rapat desa adat atau pertemuan perwakilan banjar. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi masyarakat umum masih minim, dan publikasi laporan keuangan secara terbuka belum dilakukan melalui

Perspektif teori, transparansi merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana (Mardiasmo, 2018; Halim, 2014). Keterbatasan transparansi ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pura. Oleh karena itu, perlu adanya media informasi yang dapat diakses masyarakat secara luas, seperti papan pengumuman rutin atau media digital, agar informasi keuangan dapat diketahui dan diawasi oleh seluruh umat.

Analisis pengelolaan keuangan berdasarkan Tri Hita Karana menunjukkan bahwa aspek parahyangan dan palemahan telah diterapkan dengan baik, sedangkan aspek pawongan masih perlu ditingkatkan. Pada aspek parahyangan, alokasi dana digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pemeliharaan pura, sehingga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Wiana, 2007; Suardana, 2019).

Aspek palemahan terlihat dari penggunaan dana untuk renovasi dan pemeliharaan fasilitas pura, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan fisik dan spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Wiana, 2007). Dengan demikian, peningkatan transparansi tidak hanya berdampak pada tata kelola internal, tetapi juga memperkuat keseimbangan hubungan spiritual, sosial, dan lingkungan sesuai konsep Tri Hita Karana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Denpasar telah berjalan cukup baik melalui penggunaan dana yang disertai bukti transaksi, pencatatan keuangan yang dilakukan secara rutin, serta pertanggungjawaban melalui laporan akhir kegiatan, meskipun masih bersifat sederhana dan belum terstandarisasi. Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan masih belum optimal karena keterbukaan informasi terbatas pada forum tertentu, akses laporan keuangan yang belum merata, serta belum adanya publikasi laporan secara terbuka kepada masyarakat. Ditinjau dari perspektif Tri Hita Karana, pengelolaan keuangan telah mencerminkan keseimbangan antara aspek parahyangan melalui dukungan kegiatan keagamaan, pawongan melalui partisipasi masyarakat meskipun perlu ditingkatkan dalam hal transparansi, serta palemahan melalui pemeliharaan lingkungan pura. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola meningkatkan standarisasi pencatatan keuangan, memperluas akses dan publikasi informasi keuangan kepada masyarakat, serta terus mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel dan metode penelitian agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terkait pengelolaan keuangan berbasis adat.

Angelia, N. M., Wibowo, A. S., Sudharma, N., & Dawiyah, B. (2024). Praktik Akuntabilitas dalam Perspektif Tri Hita Kirana: Studi Etnografi di Pura Pitamaha Palangkaraya. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1), 252–264. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.435>

Aryasita, P. M., & Yudiantara, I. G. A. P. (2022). Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia pada PuraDang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(2), 354–363.

Aryawati, N. P. A., & Sukendri, N. (2022). Dana Punia Sebagai Sumbangan Keagamaan Umat Hindu Lombok Dari Sisi Akuntansi. *Guna Sewaka*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.53977/jgs.v1i1.437>

Copley, P. A., & Engstrom, J. H. (2019). *Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations* by Paul Copley. https://www.academia.edu/43185799/Essentials_of_Accounting_for_Governmental_and_Not_for_Profit_Organizations_by_Paul_Copley

Dewi, N. P. N. K., & Effendy, L. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Banjar (Studi pada Banjar Suka Duka Dharma Laksana, Gerung Lobar). *UMMagelang Conference Series*, 355–365. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/10036%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/download/10036/4529>

Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2022). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>

Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Business Management Journal*, 13(2), 151–168. <https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.917>

Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 168–174. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174>

Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>

Nurkhaipa. (2017). *ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR* (Vol. 11, Issue 1).

Purnomo, I. (2018). Kajian Tri Hita Karana Pada Pemberitaan Kolom Taksu Portal Berita Antara Biro Bali. *Maha Widya Duta*, 2(2), 21–29.

Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.

Suwandi, S., Hatta, M., & Elvantoni, E. (2019). Implementasi Metode Imprest Fund Dalam Aplikasi Sistem Akuntansi Dana Kas Kecil Berbasis Web. *Jurnal Soshum Insentif*, 253–264. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.162>

Tridjaja, N. O., Setiawan, B., Sidarta, I. G., Sudiani, N. N., Puspa, A. A. O., Hemamalini, K., & Suastika, W. (2023). *Hindu Baqi Pemula (DHARMIKA)*.